

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan keamanan perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2024, yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan konvensional (*hard border*) menuju pendekatan kesejahteraan (*soft border*) sebagai perwujudan visi beranda depan negara. Perubahan ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan keterbukaan aktivitas ekonomi lintas batas, namun pada saat yang sama juga memunculkan paradoks keamanan, di mana meningkatnya konektivitas justru membuka peluang bagi munculnya ancaman non-tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pendekatan *soft border* dijalankan dalam menyeimbangkan upaya fasilitasi ekonomi dengan penanganan ancaman keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis *Soft Border* dan *Security as Practice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil membentuk ketergantungan ekonomi yang bersifat asimetris dan berfungsi sebagai instrumen diplomasi perbatasan. Pada tingkat operasional, pengawasan dilakukan melalui mekanisme penyaringan administratif oleh unsur *Customs, Immigration, and Quarantine* (CIQ) di Zona Inti. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya fenomena *Balloon Effect*, yaitu pengetatan pengawasan di gerbang resmi PLBN mendorong pergeseran aktivitas penyelundupan narkoba dan barang ilegal ke jalur-jalur tikus di wilayah penyangga yang minim pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pendekatan *Soft Border* efektif sebagai instrumen diplomasi ekonomi, penerapannya masi memerlukan penguatan integrasi kelembagaan serta perluasan pengawasan teritorial secara lebih komprehensif di luar zona pelayanan resmi.

Kata Kunci: *Soft Border*, Ancaman Non-Tradisional, PLBN Skouw, Ketergantungan Ekonomi, *Security as Practice*.

ABSTRACT

This research examines the implementation of Indonesia's border security policy at the Skouw Cross-Border Post (PLBN) during the administration of President Joko Widodo (2014-2024), which reflects a paradigm shift from a traditional security-oriented approach (Hard Border) toward a prosperity-based approach (Soft Border) as part of the front yard vision. While this shift has been accompanied by significant paradox in which inscreased cross-border connectivity creates new vulnerabilities to non-traditional threats. Accordingly, this study aims to analyze how the Soft Border approach balances economic facilitation with security threat management. Using a descriptive qualitative method and drawing on the analytical frameworks of Soft Border and Security as Practice, the findings reveal that the policy has successfully produced asymmetric economic interdependence, functioning as an instrument of border diplomacy. At the operational level, border control is implemented through administrative filtering mechanisms by Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) agencies in the Core Zone. However, the study also identifies the occurrence of a Ballon Effect, whereby tightened controls at the official border gate have displaced smuggling activities to informal routes within buffer zones that lack adequate supervision. This research cocludes that although the soft border approach is effective as a tool of economic diplomacy, its implementation still requires stronger institutional integration and more comprehensive territorial surveillance beyond the formal service areas.

Keywords: *Soft Border, Non-Traditional Threats, Skouw PLBN, Economic Interdependence, Security as Practice*